# BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan Camat dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 78) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Pendapatan Desa adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
12. Belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oieh desa.
13. Pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Pasal 2

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa yang telah disetujui BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetujui BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran Berjalan.

(3) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

(1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Camat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 28 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 JUNI 2011

# PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## A Pendahuluan

Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat mengamanatkan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa dilakukan oleh Camat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

## B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan evaluasi peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu tersusunnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

## C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa.

## D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa Tahun ANggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan angaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi
   a. Tim Evaluasi
      1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Bupati melimpahkan kewenangannya dibidang evaluasi APBDesa kepada Camat ;
      2) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk tim evaluasi dengan jumlah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat ;
      3) Tim evaluasi adalah pejabat struktural di lingkungan Kecamatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa ;
      4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Kecamatan .
   b. Dokumen Evaluasi
      1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
      2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
         a) Nota Pengantar Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD ;
         b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
         c) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
         d) Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan RAPBDesa Tahun berjalan ;
         e) Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
         f) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
         g) daftar jumlah perangkat desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi
    1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.
    2) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
    3) Apabila pelaksanaan evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes menjadi Peraturan Desa.
    4) Dengan surat pengantar, Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada desa yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
        a. Bupati Sidoarjo
        b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
    5) Berdasarkan keputusan camat sebagaimana dimaksud pada angka 2) tersebut diatas maka Kepala Desa dan BPD menyempurnakan dan selanjutnya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes tersebut menjadi Peraturan Desa dan menjadi dasar bagi Sekretaris Daerah untuk mengundangkannya dalam berita daerah.
    6) Penyempurnaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
    7) Apabila Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes, maka Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan :
        a. berlakunya APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya, untuk Peraturan Desa tentang APBDes; atau
        b. tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran Berjalan, untuk Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

3. Pelaporan

    Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa atau rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa kepada Bupati.

    Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

**MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI**
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

| MATERI EVALUASI | PARAMETER EVALUASI | PENILAIAN EVALUASI | HASIL EVALUASI |
|---|---|---|---|
| 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Pembahasan :<br>a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertai nota penyerahan dari Kepala Desa.<br>b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD dan Pemerintah Desa.<br>c. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi APBDesa | a. Diisi Nomor dan Tanggal nota penyerahan Rancangan APBDesa<br>b. Diisi dan dilampirkan Rísalah rapat/ berita acara pembahasan RAPBDesa<br>c. Diisi dan dilampirkan Nomor dan Tanggal keputusan BPD | a. ADA/ TIDAK ADA<br>b. ADA/ TIDAK ADA<br>c. ADA/ TIDAK ADA |
| 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkankan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan | Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa | Diisi Tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan APBDesa | ADA/ TIDAK ADA |
| 3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja | Ketepatan waktu penyampaian Rancangan APBDesa untuk dievaluasi | Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian surat Rancangan APBDesa dari pemerintah Desa kepada Camat | ADA/ TIDAK ADA |
| 4. Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | a. Kesesuaian dengan kepentingan umum | a. Diisi dengan nomor dan tahun keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa | a. ADA/ TIDAK ADA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b. Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi | berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD (dilampirkan)<br>b. Diisi dengan kesesuaian dasar hukum terkait penyusunan APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan | b. SUDAH/ BELUM SESUAI KETENTUAN |
| 5. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran | a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi; | 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.<br>2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi. telah diterima oleh Tim Evaluasi, Dokumen evaluasi yaitu :<br>a. Nota Penyerahan Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD ;<br>b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa<br>c. RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ;<br>d. Risalah Rapat/ Berita Acara Pembahasan RAPBDesa ;<br>e. Keputusan BPD tentang | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.<br>f. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;<br>g. Daftar jumlah perangkat desa;<br>3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.<br>4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap. | |
| | b. evaluasi administrasi dan legalitas | Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut pada angka 5 huruf a);<br>Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses pengesahan RAPBDesa dan penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan | Narasi terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian RAPBDesa sudah/ belum sesuai ketentuan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | bersama;<br>Simpulkan secara narasi | |
| | c. evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa. | 1) Evaluasi Kebijakan APBDesa :<br>Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antara RKP Desa dengan Substansi Pelaksanaan Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa :<br>Simpulkan secara narasi keterkaitan antara RKPDesa dengan RAPBDes Tahun berjalan | narasi keterkaitan antara RKPDesa dengan RAPBDes Tahun berjalan |
| | | 2) Evaluasi Struktur APBDesa, untuk mengevaluasi kesesuaian antara struktur APBDesa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:<br>a). Pendapatan Desa;<br>b). Belanja Desa; dan<br>c). Pembiayaan Desa<br>a) Langkah evaluasi pendapatan,<br>(1) menganalisis apakah pendapatan desa telah dicantumkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 2) Struktur APBDesa sudah/ belum sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa<br>a) Evaluasi Pendapatan<br>(1) Struktur Pendapatan Desa sudah/ belum sesuai Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2010 tentang Pengelolaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (2) Teliti, terutama ADD, Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa sudah dicantumkan sesuai jumlah yang diterima<br><br>b) Evaluasi Belanja<br><br>Evaluasi belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung, digunakan untuk membiayai belanja desa dalam bentuk program dan kegiatan<br><br>c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.<br><br>Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayan, sebagaiamana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; | Keuangan Desa<br><br>(2) ADD, Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten sudah/ belum dicantumkan sesuai jumlah yang diterima<br><br>b) Evaluasi Belanja<br><br>Struktur Belanja Desa sudah/ belum sesuai tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa<br><br>c) Evaluasi Pembiayaan<br><br>Struktur Pembiayaan Desa sudah/ belum sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |

**CONTOH KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

KOP SURAT

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....**
**NOMOR ... .....TAHUN .....**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN.....DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA..... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

**CAMAT .....,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dan Rancangan Peraturan Kepala Desa.....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 78 tahun 2008 pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat.....Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembetukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 seri E).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dan Rancangan Peraturan Kepala Desa..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....adalah sebagai berikut:

KESATU : I. PENDAPATAN DESA

| | | |
|---|---|---|
| a. | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Rp. ..... |
| b. | Bagi Hasil Pajak Kabupaten; | Rp. ..... |
| c. | Bagian dari Retribusi Kabupaten; | Rp. ..... |
| d. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. ..... |
| e. | Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya; | Rp. ..... |
| f. | Hibah; | |
| g. | Sumbangan Pihak Ketiga. | Rp. ..... |
| | Jumlah Pendapatan | **Rp. .....** |

KEDUA : II. BELANJA DESA

| | | |
|---|---|---|
| a. | Belanja Langsung, terdiri dari: | |
| | 1). Belanja Pegawai | Rp. ..... |
| | 2). Belanja Barang dan Jasa | Rp. ..... |
| | 3). Belanja Modal; | Rp. ..... |
| | Jumlah Belanja Langsung | **Rp. .....** |
| b. | Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: | |
| | 1). Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | Rp. ..... |
| | 2). Belanja Subsidi | Rp. ..... |
| | 3). Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) | Rp. ..... |
| | 4). Belanja Bantuan Sosial | Rp. ..... |
| | 5). Belanja Bantuan Keuangan | Rp. ..... |
| | 6). Belanja Tak Terduga; | Rp. ..... |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | **Rp. .....** |
| | Jumlah Belanja | Rp. ..... |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. ..... |

KETIGA : III. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan : Rp. .....

b. Pengeluaran : Rp. .....

Jml Pembiayaan : Rp. .....

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan : Rp. .....

KEEMPAT : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dan Rancangan Peraturan Kepala Desa.....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....sebagaimana tersebut pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDesa Tahun Anggarah ..... berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEENAM : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDesa Tahun Anggaran ..... .dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ..... menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran.....

KETUJUH : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ..... yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ..... Tentang APBDesa Tahun Anggaran..... Dan..... Peraturan Kapala Desa ..... tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran ..... , sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

CAMAT.....,

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

**CONTOH LAPORAN HASIL EVALUASI**
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

KOP SURAT

Sidoarjo, Januari 2011

Kepada

Nomor : 141 / /404. . /2010
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Raperdes APBDesa

Yth. Sdr. Bupati Sidoarjo
di
S I D O A R J O

Bersama ini disampaikan dengan hormat hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran ..... (sebagaimana keputusan Camat terlampir) terhadap desa-desa :

1. Desa.....
2. Desa.....
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar diundangkan dalam berita daerah terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut diatas

Demikian untuk menjadikan maklum

CAMAT.....

Nama Terang
Pangkat
Nip.

Tembusan Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Sidoarjo;
3. Sdr. Kabag. Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH